

BAB IV.

UPAYA ADVOKASI *HUMAN RIGHTS WATCH* (HRW) TERHADAP ISU HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI XINJIANG

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang upaya dari HRW dalam melakukan advokasi isu HAM yang terjadi di Xinjiang, China ke ranah internasional. Upaya ini dilakukan untuk menekan pemerintah China agar bertanggung jawab dan mengungkap fakta yang telah terjadi di Xinjiang. Upaya yang dilakukan HRW akan membuktikan argumen utama yang telah dipaparkan penulis pada BAB I yaitu dengan menekan organisasi internasional seperti PBB, UE dan juga beberapa negara lainnya sehingga dapat menekan pemerintah China dalam menutup kamp-kamp interniran bagi warga Uyghur di Xinjiang. Untuk mempermudah pemahaman, penulis akan mengimplementasikan strategi advokasi yang diperkenalkan oleh Keck dan Sikkink dalam menganalisis kasus tersebut Strategi yang dimaksud diantaranya strategi *Information Politics* dan *Accountability Politics*.

A. Strategi *Transnational Advocacy Network*

Ketika jaringan antara negara dan aktor domestiknya diblokir oleh suatu negara, pola *Boomerang Pattern* dapat digunakan untuk mempengaruhi karakteristik, jaringan internasional terjadi ketika negara memblokir aktor domestik (NGO), aktor ini secara langsung mencari sekutu internasional untuk mencoba memberikan tekanan pada negara tersebut (Keck & Sikkink, 1998, p. 12). Pola *Boomerang Pattern* merupakan suatu bentuk pola strategi yang dilakukan dalam *Transnational Advocacy Network*, dimana keterbatasan kemampuan kelompok lokal dalam level nasional diatasi dengan membentuk *Transnational Network* untuk

mendapatkan dukungan dari internasional. Dukungan internasional terhadap kelompok lokal tersebut kemudian digunakan untuk mewujudkan tujuan atau kepentingan mereka dengan cara mencoba menekan negaranya dari luar, terkait kebijakan ataupun perilaku dari negara tersebut dalam suatu isu tertentu. Pada dasarnya aktor-aktor berusaha untuk mencari pengaruh seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok politik maupun gerakan sosial lainnya dalam skala internasional dikarenakan terhambatnya aktor domestik di dalam suatu negara. Karena mereka tidak memiliki *power* dalam artian tradisional, maka mereka harus menggunakan kemampuan informasi, ide, serta strategi yang mereka miliki. Proses yang dilalui pada umumnya adalah dengan cara persuasi atau sosialisasi, dan kadang kala disertai dengan tekanan (*pressure*) (Keck & Sikkink, 1998, p. 93).

Keck & Sikkink menggunakan strategi tersendiri dalam melaksanakan konsep ini dengan membagi menjadi empat yaitu :

1. *Information politics*,

Politik informasi meliputi pengumpulan informasi dan identifikasi, serta teknik penyebaran informasi ke berbagai pihak sebagai langkah untuk mendukung perjuangan dalam sebuah isu.

2. *Symbolic politics*,

sebagai upaya perjuangan dapat menempuh dengan menggunakan simbol-simbol, aksi-aksi dan cerita atas situasi yang dapat menarik perhatian dan memberikan penjelasan untuk menyakinkan masyarakat agar kembali memberikan dukungan dan memperhatikan isu.

3. *Leverage politics*,

Taktik dengan cara berkerjasama dengan aktor yang lebih kuat dan melakukan berbagai tekanan dengan cara mendesak beberapa pihak yang

dianggapnya dapat berpengaruh dalam penyelesaian masalah kemanusiaan.

4. *Accountability politics*,

Jaringan yang ada berperan dalam melakukan upaya untuk meyakinkan pemerintah dan aktor lain untuk mengubah posisi mereka dalam satu isu. Ketika target telah memberikan komitmen untuk mengubah perilakunya atas suatu isu, Taktik yang seperti ini perlu dilakukan oleh jaringan agar tidak terjadi penyimpangan dari komitmen aktor yang ditargetkan (Ula, 2017, pp. 22-23).

B. Strategi *Information Politics* yang dilakukan HRW

Strategi *Information Politics* merupakan strategi yang dilakukan dengan cara mengikat anggota jaringan untuk mencapai efektivitas jaringan. Strategi ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menyediakan informasi bagi masyarakat serta mendramatisir fakta melalui pernyataan-pernyataan korban dan sebagainya sehingga menarik perhatian (Azizah, 2013). Untuk dapat mempengaruhi publik, informasi yang akan dipublikasikan harus mengandung fakta dan juga kesaksian dari orang yang mengalami kejadian tersebut. Sehingga sebuah informasi memiliki nilai jual untuk mempengaruhi *audience* dalam mengambil tindakan; mempercayai isu yang dibawa oleh kelompok tersebut. HRW menggunakan upaya strategi *information politics* dengan menginformasikan adanya pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Xinjiang, China yang diinformasikan melalui:

1. Laporan HRW berjudul “*Eradicating Ideological Viruses*” *China’s Campaign of Repression Against Xinjiang’s Muslims*.

Pada 9 september 2018 HRW mempublikasikan laporan yang berisi dari hasil wawancara kepada setiap korban dari kebijakan represif yang terjadi di Xinjiang, terutama pada kepada etnis muslim Uyghur. *Human Rights Watch* mewawancarai lima mantan tahanan di kamp pendidikan politik dan pusat penahanan formal; 38 orang yang diwawancarai adalah kerabat para tahanan saat ini; dan 10 adalah kerabat individu tidak diizinkan meninggalkan Xinjiang. Di antara 58 orang yang diwawancarai, 19 orang-orang telah meninggalkan Xinjiang setelah Januari 2017. Dalam laporan ini menyajikan bukti baru dari penahanan, penyiksaan, dan perlakuan sewenang-wenang pemerintah Tiongkok terhadap Muslim Turki di Xinjiang dan kontrol sistemik yang semakin meluas pada kehidupan sehari-hari di sana. Pelecehan yang merajalela ini melanggar hak-hak dasar untuk kebebasan berekspresi, agama, dan privasi, dan perlindungan dari penyiksaan dan pengadilan yang tidak adil. Secara lebih luas, kontrol pemerintah atas kehidupan sehari-hari di Xinjiang terutama memengaruhi etnis Uyghur, Kazakh, dan minoritas lainnya, yang melanggar hukum internasional terhadap diskriminasi (Human Rights Watch, 2018).

Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah China telah mencurahkan sumber daya keuangan, manusia, dan teknis yang sangat besar untuk kontrol sosial di Xinjiang. Pihak berwenang telah mempekerjakan puluhan ribu personel keamanan tambahan sambil membangun sejumlah kantor polisi dan pos pemeriksaan di wilayah

tersebut. Mereka telah memonitor secara dekat jaringan keluarga dan sosial masyarakat sebagai indikator tingkat kepercayaan politik mereka. Pemerintah menahan orang dan memberikan mereka kontrol yang lebih tinggi tidak hanya berdasarkan perilaku atau kepercayaan mereka sendiri, tetapi juga orang-orang dari anggota keluarga mereka suatu bentuk hukuman kolektif yang bertentangan dengan hukum hak asasi manusia internasional (Human Rights Watch, 2018).

Dalam tinjauannya Laporan ini mencakup pengalaman langsung dari mereka yang ditahan di kamp-kamp pendidikan politik dan pusat-pusat penahanan. Kamp-kamp pendidikan politik ini fokus pada disiplin gaya militer dan indoktrinasi politik yang meluas dari para tahanan. Muslim Turk secara tidak proporsional terwakili dalam populasi tahanan dibandingkan dengan populasi umum di wilayah tersebut, meskipun bahasa setempat dan praktik keagamaan dilarang atau tidak dianjurkan. Tahanan diharuskan untuk memahami “kejahatan” yang telah mereka lakukan, meskipun tindakan itu bukan merupakan pelanggaran pidana menurut hukum pidana Tiongkok. Di beberapa daerah, pihak berwenang telah menempatkan kode QR di setiap rumah. Xinjiang bukan satu-satunya wilayah di mana pihak berwenang China telah menempatkan kode QR di tempat tinggal, dan pihak berwenang mengklaim bahwa pelat pintu "pintar" ini membantu pengendalian populasi dan pemberian layanan. Di Xinjiang, pejabat memindai pelat pintu dengan perangkat seluler mereka ketika mereka masuk untuk memantau penduduk. Pihak berwenang telah mengumpulkan data biometrik mereka - dari DNA hingga sampel suara. Otoritas

mengumpulkan data ini ketika orang mengajukan paspor atau kartu ID, dan selama interogasi polisi (Human Rights Watch, 2018).

Tindakan pemerintah Tiongkok di Xinjiang bertentangan dengan konstitusi Tiongkok dan melanggar kewajiban China berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional. Ini termasuk perlindungan dasar tentang kebebasan berekspresi, agama, kehidupan keluarga, privasi, dan pergerakan serta dari ditangkap secara sewenang-wenang, ditahan, dan menjadi sasaran penyiksaan dan perlakuan buruk. Tindakan China terhadap populasi etnis minoritas di Xinjiang juga melanggar perlindungan hukum internasional terhadap diskriminasi ras dan etnis. Mereka yang menyangkal hak-hak fundamental mereka tidak memiliki jalan yang memadai untuk pemulihan, termasuk untuk pelanggaran paling serius (Human Rights Watch, 2018).

2. World Report 2015: *Tyranny's False Comfort Why Rights Aren't Wrong in Tough Times.*

Pendekatan yang dilakukan pemerintah China ke Xinjiang, provinsi barat laut yang merupakan rumah bagi minoritas Muslim Uyghur, adalah untuk menanggapi keluhan tentang pelanggaran hak asasi manusia dengan lebih banyak pelanggaran dan pembatasan hak asasi manusia. Beijing mengklaim bahwa tindakan kerasnya diperlukan untuk memerangi separatisme dan terorisme, tetapi taktiknya adalah untuk memberlakukan beberapa kebijakan yang paling kejam dan diskriminatif terhadap warga Uyghur, termasuk larangan mengenakan janggut dan kerudung, pembatasan puasa, dan diskriminasi terbuka sehubungan dengan pendidikan agama. Meningkatnya serangan mematikan terhadap

warga sipil dan pasukan keamanan di Xinjiang adalah keprihatinan serius bagi pemerintah. Namun ketergesaan pemerintah menghubungkan kekerasan dengan “teroris Uyghur” sementara jarang menghasilkan bukti dan secara rutin menyangkal para tersangka hak atas pengadilan yang adil sehingga menciptakan lingkaran setan di mana orang-orang Uyghur yang sudah tertekan merasa terus-menerus dikepung oleh negara (Roth, 2015).

Jika, tersedia untuk umum, mustahil untuk menilai dengan keyakinan apakah mereka yang dihukum dan sering dihukum mati bertanggung jawab atas kekerasan dan apakah tindakan kontraterorisme pemerintah yang keras ditujukan pada orang yang tepat. Seperti yang diilustrasikan oleh hukuman seumur hidup yang sangat keras yang dijatuhkan pada September kepada Ilham Tohti, seorang ekonom Uyghur moderat, negara tetap tidak mau membedakan antara kritik damai dan mereka yang terlibat dalam kekerasan. Dengan kejam menuntut kritik damai, hampir tidak menyisakan ruang untuk kebebasan beragama atau budaya, dan memperluas strategi ekonomi di mana warga Uyghur tidak dapat bersaing secara setara dengan para migran China Han adalah resep untuk meningkatnya kekerasan (Roth, 2015).

C. Strategi *Accountability Politics* yang dilakukan HRW

Strategi *Accountability Politics* merupakan strategi yang berupaya untuk meyakinkan pemerintah dan aktor lain untuk dapat mengubah pandangan mereka terhadap suatu persoalan. Aktivis jaringan mencoba membuat peluang untuk menuntut suatu

pemerintahan melakukan pertanggungjawaban politik (Keck & Sikkink, 2014). Upaya ini dilakukan dengan menuntut pertanggungjawaban politik bagi Pemerintahan China atas kebijakan pembuatan kamp-kamp pendidikan ulang terhadap laporan adanya pengekangan HAM, kebebasan ruang gerak, dan penindasan bagi warga Uyghur.

Human Rights Watch sebagai aktor INGO dalam penegakkan HAM di seluruh Dunia hadir untuk mengadvokasi kebijakan kamp-kamp interniran di Xinjiang, China. Dalam upayanya, HRW melakukan strategi *Accountability Politics* sebagai bentuk pertanggungjawaban negara China dalam menghormati Hak Asasi Manusia. Startegi ini dilakukan oleh HRW dikarenakan dalam persoalannya berkaitan dengan kedaulatan negara. Berikut upaya *Accountability Politics* yang dilakukan *Human Rights Watch* (HRW) dalam menegakkan HAM pada kebijakan kamp-kamp interniran dan upaya penghapusan budaya muslim Uyghur di Xinjiang, China:

1. Upaya mendesak pemerintah Xinjiang dan pemerintah China

HRW mendesak pemerintah Republik Rakyat China dengan tuntutan sebagai berikut:

- a. Segera tutup semua kamp pendidikan politik di Xinjiang, dan lepaskan semua orang yang ditahan.
- b. Hormati hak atas kebebasan berekspresi, berkumpul, berserikat, beragama, dan budaya untuk memastikan bahwa Muslim Turki dapat terlibat dalam kegiatan damai dan menyampaikan kekhawatiran dan kritik.
- c. Berikan akses ke Xinjiang seperti yang diminta oleh beberapa prosedur khusus PBB.

- d. Tangguhkan pengumpulan dan penggunaan biometrik di Xinjiang sampai ada undang-undang nasional dan komprehensif yang melindungi privasi orang, menghapus data biometrik dan terkait yang telah dikumpulkan berdasarkan kebijakan saat ini (Human Rights Watch, 2018, p. 102).

HRW pun menuntut kepada komite tetap kongres rakyat nasional untuk meninjau dan merevisi undang-undang yang relevan dengan pengumpulan data biometrik untuk memastikan mereka sesuai dengan standar HAM internasional. Standar-standar ini harus menjadi bagian dari kerangka hukum yang memastikan pengumpulan, penggunaan, penyebaran, dan penyimpanan data tersebut diperlukan dalam arti bahwa langkah-langkah yang kurang intrusif tidak tersedia; dibatasi secara tepat untuk memastikan tindakan itu proporsional dengan tujuan yang sah seperti keselamatan publik dan tidak merusak esensi dari hak privasi dan hak terkait lainnya. Untuk memastikan standar ini ditegakkan, program data biometrik apa pun juga harus mencakup otorisasi independen untuk pengumpulan dan penggunaan, pemberitahuan publik, dan sarana pengawasan independen, serta jalan bagi orang-orang untuk menentang pelanggaran dan memiliki akses ke pemulihan. Pihak berwenang juga harus mempublikasikan informasi tentang pengumpulan dan penggunaan teknologi pengenalan berbasis biometrik, termasuk pengungkapan tentang database yang telah dibuat dan pencarian spesifik yang mereka lakukan (Human Rights Watch, 2018, p. 103).

2. Upaya mendesak Uni Eropa (UE)

HRW dan Organisasi HAM lainnya mendesak para pemimpin UE untuk menekan China agar mengizinkan misi pencarian fakta internasional yang independen tentang Xinjiang, untuk membebaskan tahanan politik, dan untuk meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Para pemimpin Uni Eropa harus menekan rekan-rekan China mereka tentang situasi hak asasi manusia yang memburuk di negara itu selama KTT Uni Eropa-Tiongkok di Brussels pada 9 April 2019. Mereka harus memperkuat kekhawatiran yang muncul selama dialog hak asasi manusia Uni Eropa-China pada 1-2 April dan menyerukan pihak berwenang China untuk menutup kamp-kamp "pendidikan politik" di Xinjiang (Human Rights Watch, 2019).

3. Upaya mendesak PBB

Pada Februari 2019 HRW pun mendesak dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHR) dalam suratnya untuk segera mengadopsi resolusi menetapkan pencarian fakta internasional misi untuk menyelidiki tuduhan yang kredibel bahwa hingga satu juta Muslim Turki sedang ditahan sewenang-wenang di kamp "pendidikan politik" di Xinjiang, China. Direktur eksekutif HRW Kenneth Roth mendesak sekjen PBB Antonio Guterres. HRW dan belasan organisasi HAM dan kemasyarakatan sipil lainnya, termasuk *Amnesty International* dan *World Uyghur Congress* menyampaikan permintaan pada badan HAM PBB untuk mengirimkan sebuah tim pencari fakta ke wilayah Xinjiang (Hutapea, 2019).

Kenneth Roth pun telah meminta Sekjen Antonio Guterres untuk menggunakan wewenangnya untuk menyerukan dan mendesak pemerintah China agar dapat menutup kamp

interniran dan juga meminta kepada komisioner petinggi PBB dalam hak asasi manusia Michelle Bachelet dan para pakar PBB untuk diberikan akses sepenuhnya dalam menciptakan tim pencari fakta yang diterjunkan ke Xinjiang (Human Rights Watch, 2019).

4. Upaya mendesak pemerintah Australia

HRW telah mengirim surat kepada menteri Marise Payne Australia atas diangkatnya kembali Marise Payne menjadi menteri luar negeri Australia, HRW berharap dapat berkerjasama dan menjadikan perlindungan hak asasi manusia menjadi bagian dari kebijakn luar negeri Australia. Dalam isi suratnya HRW telah mendesak pemerintah Australia secara aktif bekerja untuk memastikan pernyataan bersama pada sesi juni mendatang dalam Dewan Hak Asasi Manusia dan menyerukan China untuk mendukung akses independen Komisariss Tinggi PBB untuk memantau dan melaporkan situasi yang terjadi di wilayah Xinjiang (Human Rights Watch, 2019).

Di Tiongkok, sebuah resolusi sangat dibutuhkan untuk membentuk misi pencarian fakta internasional di Xinjiang, wilayah di mana sekitar satu juta orang Uyghur dan Muslim Turki lainnya telah atau sedang ditahan secara sewenang-wenang. Minimal, kami mendesak Australia untuk secara aktif bekerja untuk memastikan pernyataan bersama pada sesi Juni mendatang dari Dewan Hak Asasi Manusia menyerukan China untuk mendukung panggilan Komisariss Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia untuk akses independen untuk memantau dan melaporkan hak asasi manusia situasi di Xinjiang.

5. Upaya mendesak pemerintah Prancis

HRW pun mendesak negara Prancis. HRW mendesak presiden Prancis Emmanuel Macron. Dalam suratnya HRW mendesak presiden Macron untuk menekan presiden Xi Jinping dalam kunjungan ke Prancis. HRW mendesak presiden Macron untuk izinkan akses yang berarti ke wilayah Xinjiang untuk komisararis tinggi PBB hak asasi manusia dan perwakilan PBB lainnya, konsisten dengan seruan baru-baru ini oleh Perancis dan Uni Eropa (Human Rights Watch, 2019).

D. Pengaruh Strategi *Information Politics* dan *Accountability Politics* terhadap Dunia Internasional

Upaya HRW dalam menegakkan HAM pada kebijakan China tentang kamp-kamp Pendidikan ulang di Xinjiang, melalui strategi *Information Politics* dan *Accountability Politics* telah menimbulkan berbagai respon dari dunia internasional yang mendukung perlindungan terhadap HAM etnis Uyghur. Pengaruh dari strategi tersebut adalah terdapat usaha dari dunia internasional untuk turut mendesak pemerintah China menghentikan program berupa kamp-kamp Pendidikan ulang bagi etnis Uyghur, diantaranya yaitu:

1. Amerika Serikat dan 22 negara lainnya mendesak China

22 negara telah menandatangani surat yang ditujukan kepada presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Komisararis Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia yang menyerukan China untuk mengakhiri program penahanan besar-besaran di Xinjiang, para penandatangan dalam surat ini menyatakan keprihatinan tentang "laporan kredibel tentang penahanan sewenang-

wenang" di Xinjiang dan "pengawasan luas dan pembatasan" khususnya yang menargetkan warga Uyghur dan minoritas lainnya. Para penandatangan menyerukan China untuk menegakkan hukum nasional dan komitmen internasionalnya, termasuk sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia, dan "menahan diri dari penahanan sewenang-wenang dan pembatasan kebebasan bergerak bagi warga Uyghur, dan komunitas Muslim dan minoritas lainnya di Xinjiang" (Putz, 2019).

Duta Besar AS untuk Inggris Karen Pierce menyampaikan pernyataan bersama ke 193 anggota komite hak asasi manusia (HAM) Majelis Umum AS. Pernyataan itu dibuat atas nama 23 negara, termasuk AS, Australia, Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, dan Swedia. Sekitar satu juta warga Uyghur dan anggota kelompok minoritas muslim lainnya dilaporkan ditahan di kamp-kamp di Xinjiang. Bahkan menurut Dolkun Isa dari *World Uyghur Congress*, kelompoknya meyakini jumlah mereka yang ditahan di Xinjiang telah mencapai "kemungkinan tiga juta orang". Hal tersebut disampaikan Isa kepada para wartawan via video link dari Oslo, Norwegia pada Senin waktu setempat (Mangkuto, 2019).

"Kami meminta pemerintah China untuk menegakkan hukum nasional dan kewajiban internasional, serta komitmen untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama atau keyakinan, di Xinjiang dan di seluruh China," kata Pierce. Kelompok negara itu mendorong China untuk segera menerapkan rekomendasi ahli independen AS tentang situasi di Xinjiang. Termasuk menahan diri dari tindakan sewenang-wenang terhadap warga Uyghur dan

anggota komunitas Muslim lainnya. Mereka juga meminta negara-negara untuk tidak mengirim pengungsi atau pencari suaka kembali ke China, jika etnis minoritas ini masih menghadapi penganiayaan (Mangkuto, 2019).

Selain itu Pemerintah Amerika Serikat memasukkan 28 organisasi China ke dalam daftar hitam karena dugaan keterlibatan mereka dalam pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uyghur di provinsi Xinjiang. Ke-28 organisasi itu sekarang berada dalam Daftar Entitas, yang berarti mereka tidak bisa membeli produk dari perusahaan AS tanpa persetujuan dari Washington. Departemen Perdagangan AS mengumumkan keputusannya pada tanggal 7 Oktober 2019 beberapa perusahaan teknologi masuk kedalam daftar hitam dalam aksi pemerintah China berupa "kampanye penindasan, penahanan massal yang sewenang-wenang, dan pengawasan dengan teknologi tinggi terhadap warga Uyghur, Kazakstan, dan anggota kelompok minoritas Muslim lainnya". Biro Keamanan Publik Provinsi Xinjiang ada dalam daftar, bersama dengan 19 lembaga pemerintah lainnya. Hikvision, Dahua Technology, dan Megvii Technology ada di antara delapan kelompok komersial dalam Daftar Entitas. Semua perusahaan tersebut berspesialisasi dalam teknologi pengenalan wajah. Hikvision adalah salah satu produsen peralatan pengawasan terbesar di dunia (BBC, 2019).

Setelah pengumuman daftar hitam, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan bahwasanya AS akan memberlakukan pembatasan visa pada pejabat Tiongkok yang diyakini bertanggung jawab atas, atau terlibat dalam penahanan atau penyalahgunaan etnis Uyghur.

Langkah-langkah tersebut adalah tanggapan AS yang paling signifikan terhadap meningkatnya perhatian pada nasib kaum Uyghur dari kelompok-kelompok hak asasi manusia, para pemimpin dunia dan media (Sandler, 2019).

2. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Komisaris Tinggi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia (HAM), Michelle Bachelet menyampaikan pidato pertamanya kepada Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, Swiss Senin (10/9). Dalam pidatonya itu, Bachelet mengecam China atas penganiayaan terhadap Muslim Uyghur di Beijing. Mereka ditahan di kamp yang disebut 'kamp pendidikan ulang'. Ia menggambarkan tuduhan atas penahanan ini sesuatu yang sangat mengganggu. Menyinggung laporan pelanggaran HAM di wilayah lain di China, Bachelet meminta Beijing mengizinkan pemantau Amerika Serikat melakukan pemantauan di seluruh China. Akan tetapi, delegasi China tidak segera menanggapi permintaannya (Republika, 2018).

Kepala Badan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Michelle Bachelet, meminta pemerintah China mengizinkan tim monitor masuk ke negara itu. Ini terkait adanya tuduhan yang sangat mengkhawatirkan soal penerapan kamp indoktrinasi politik terhadap warga Uyghur di Provinsi Xinjiang. Permintaan Bachelet ini berdasarkan laporan dari lembaga advokasi HAM Human Rights Watch. Pengurus HRW telah melaporkan etnis muslim minoritas Uyghur mengalami kamp penahanan semena-mena di Xinjiang, yang dibuat pemerintah China. Aparat China melakukan pembatasan praktek keagamaan, melakukan indoktrinasi politik,

hingga memasang kamera pengenalan identitas wajah bagi sekitar satu juta warga Uyghur. “Sejumlah laporan menyoroti adanya pola pelanggaran HAM di wilayah itu,” kata Bachelet sambil meminta pemerintah Beijing untuk membuka akses bagi staf dari Badan HAM PBB untuk mengecek tuduhan-tuduhan ini. Dia berharap kedua pihak bisa segera berdiskusi soal ini (Tempo.co, 2018).

3. Uni Eropa

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini memperingatkan keadaan China yang terus memburuk pada masalah hak-hak sipil dan politik meskipun ada kemajuan dalam hak-hak ekonomi dan sosial. Uni Eropa telah berulang kali menyuarakan keprihatinan tentang situasi hak asasi manusia di Xinjiang, menyoroti masalah kamp khususnya dan memperingatkan bahwa kebebasan beragama harus segera diatasi. Mengenai memburuknya hak asasi manusia, Mogherini menuturkan, penangkapan terhadap pembela HAM dan pengacara masih berlangsung terhadap yang melanggar kebebasan mendasar. “Dengan melihat laporan tentang situasi di Xinjiang, terutama adanya ‘kamp pendidikan ulang’ yang menargetkan warga Uyghur dan minoritas lainnya dengan pengawasan massal dan dibatasinya akses perjalanan. Ini adalah pesan bahwa kita harus secara konsisten dan dengan cara yang koheren, sebagai orang Eropa, di semua tingkatan Parlemen, Komisi, Dewan, dan masing-masing Negara Anggota menekan hubungan bilateral mereka dengan China,” tegasnya (Mi'raj News Agency (MINA), 2019).

4. Respons Pemerintah China

Pemerintah China mengklaim telah membebaskan 90 persen tahanan muslim Uyghur dari kamp di Xinjiang yang disebut sebagai tempat pendidikan (pelatihan) ulang. Dalam klaimnya, pemerintah China juga menyebut warga yang telah dibebaskan kini telah mendapatkan pekerjaan. Wakil pemimpin pemerintah Xinjiang, Arken Tuniaz mengklaim lebih dari 90 persen telah menyelesaikan pelatihan dan kembali ke keluarga mereka. Namun para ahli dan pengacara meragukan klaim tersebut karena tak ada bukti pembebasan tahanan dalam jumlah besar (Ariyanti, 2019).